

DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAROPEN

Bella Sofia Araniri*¹, Mariolin A. Sanggenafa (mariolinsanggenafa83@gmail.com)²,
Ulfah Rizky Muslimin (Ulfahlud@gmail.com)³

^{1*23} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih
*Corresponding Author

Abstract

This study aims to analyze the effect of human resource competencies, government internal control systems and regional financial accounting systems on the quality of local government financial reports. This research was conducted on all OPD in Waropen district. Data collection in this study used a questionnaire distributed to 40 OPD Waropen District. The sampling technique used in this research is purposive sampling. The number of research sample taken as many as 50 respondents. Data analysis tools in this study include validity tests, descriptive statistics, multiple linear regression analysis, classical assumption test, and hypothesis testing using SPSS V.26 software. Based on the results of research using SPSS as a test tool, it shows that the competence of human resources and the local government financial accounting system has no effect on the quality of local government financial reports, while the local government internal control system has a positive influence on the quality of local government financial reports.

Keywords: *human resource competence; government internal control system and regional; financial accounting system on the quality of local government financial reports.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada seluruh OPD yang berada di kabupaten waropen. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan pada 40 OPD Kabupaten Waropen. Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Jumlah sampel penelitian yang diambil sebanyak 50 responden. Alat analisis data dalam penelitian ini meliputi uji validitas, statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan software SPSS V.26. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan SPSS sebagai alat uji menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: kompetensi sumber daya manusia; sistem pengendalian intern pemerintah; sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia memiliki peranan penting dalam menyiapkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Sumber Daya Manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan dapat membantu dalam proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas (Aprisyah & Yuliati, 2021). Oleh sebab itu, Sumber Daya Manusia yang kompeten tersebut akan lebih mudah memahami logika akuntansi dengan baik. Pembuatan laporan keuangan akan berjalan dengan efektif dan efisien jika seluruh pegawai yang membuat laporan keuangan tersebut memahami akuntansi.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun kenyataannya, tidak semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) memahami apa itu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Karena kurangnya edukasi terkait penyusunan laporan keuangan juga mempengaruhi kinerja pegawai. Faktanya, tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) belum mencapai standar yang diharapkan. Begitu juga dengan penegakan disiplin yang belum dilaksanakan sesuai sistem atau masih tergantung komitmen aparat (www.papua.go.id).

Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 22 Juni 2021 yang dipublikasikan melalui media elektronik nasional www.aceh.bpk.go.id menyebutkan bahwa:

“Sebanyak 468 pemerintah daerah atau 93,04 persen dari total pemerintah daerah masih dalam status pengelolaan keuangan yang sama dari tahun 2013 hingga 2020. Artinya, tingkat kemandirian fiskal mereka belum berkembang dalam tujuh tahun terakhir. Hasil BPK lainnya menunjukkan bahwa kesenjangan kemandirian keuangan antar daerah masih cukup besar”.

Melalui pernyataan tersebut, menjelaskan bahwa kemampuan daerah masih belum merata. Selain itu, lembaga pemeriksaan berpendapat bahwa daerah yang bukan penerima dana otonomi khusus memiliki persentase kemandirian pajak yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah yang menerima dana otonomi khusus. Penerima dana otsus adalah negara bagian Aceh, Yogyakarta dan Papua. Hal ini menunjukkan bahwa Ini menunjukkan bahwa pemberian dana otonomi khusus sebagai bagian dari transfer cenderung menimbulkan ketergantungan daerah atas transfer pusat www.cnnindonesia.com.

Secara keseluruhan, pada semester 1 Tahun 2020, Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan:

Tabel 1.1
Laporan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Opini	LKPD	
	2020	%
WTP	485	90
WDP	50	9
TMP	6	1

Sumber : Laporan IHSP Semester 1 Tahun 2020

Dapat dilihat secara umum kualitas LKPD Tahun 2019 mengalami peningkatan, namun satu pemerintah daerah belum menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu Pemerintah Kabupaten di Waropen, Papua. Tidak hanya itu, dari tahun 2007 hingga saat ini juga Pemerintah Kabupaten Waropen juga mendapatkan opini Tidak Menyatakan pendapat (TMP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pemerintah Papua mengatakan masalah itu disebabkan kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan laporan keuangan daerah masih sangat belum memadai.

Kondisi diatas menggambarkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia masih sangat kurang kurang kompeten dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta Sistem Pengendalian Internalnya yang masih belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seperti pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Waropen masih banyak ditemui berbagai permasalahan seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen pernah menjadi daerah dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbanyak terlibat dalam kasus korupsi, sekitar 10 sampai 20 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak aktif lagi bekerja dengan alasan yang tidak jelas. Akan tetapi, gaji mereka tetap dibayarkan. Ini semua yang mengakibatkan pengelolaan kualitas laporan keuangan belum bisa sesuai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Beberapa penelitian telah meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Secara ringkas, hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dapat disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Research Gap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Independen	Variabel Dependen	Peneliti	Hasil
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kompetensi Sumber Daya Manusia	(Saraswati & Budiasih, 2019)	Berpengaruh
		(Aprisyah & Yuliati, 2021)	Tidak Berpengaruh
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	(Trisnawati & Wiratmaja, 2018)	Berpengaruh
		(Ferdian, 2021)	Tidak Berpengaruh
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	(Mutmainnah, 2020)	Berpengaruh
		(Mustika & Fadilah, 2020)	Tidak Berpengaruh

Sumber: Peneliti 2022

Maka berdasarkan uraian diatas research gap pada penelitian ini adalah terjadinya tidak konsistensi atau perbedaan hasil penelitian sehingga ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti kembali. Dimana sebagian peneliti menyimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, namun ada juga peneliti yang menyimpulkan bahwa ternyata bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak

berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Dewi & Dewi, 2020) sebelumnya dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada tahun penelitian yang digunakan lebih terbaru dari penelitian sebelumnya yaitu tahun 2022, dan perbedaan tempat penelitian. Mengacu pada latar belakang dan gap yang ditemukan pada ketidak-konsistenan pendapat peneliti sebelumnya maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut terkait “Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen”.

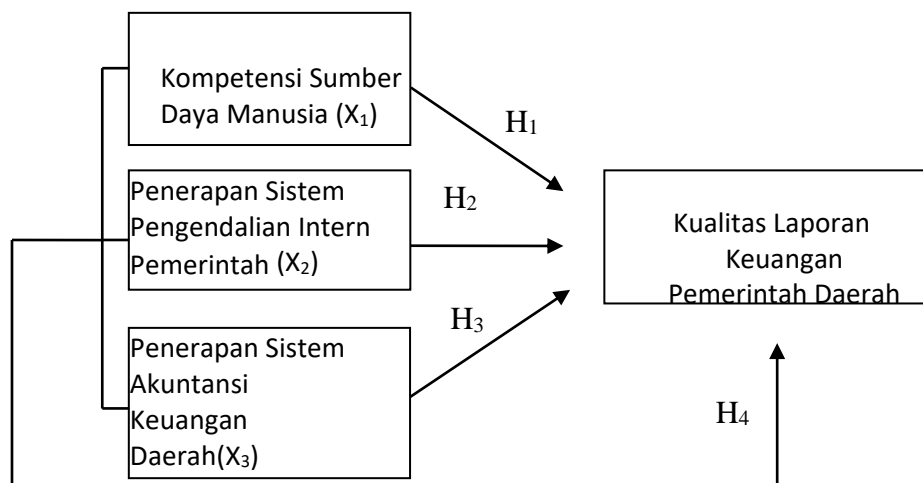
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan pemerintah daerah secara parsial maupun simultan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial maupun simultan.

Kajian Pustaka

Model Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas, dapat dibuat model penelitian untuk menggambarkan hubungan antara variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah :

Gambar 2.1
Model Penelitian



Sumber: (Ferdian, 2021)

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner pada seluruh OPD Kabupaten Waropen, populasi penelitian adalah 40 OPD Kabupaten Waropen. Sampel yang digunakan yaitu pegawai bagian keuangan.

Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive sampling*. Adapun kriteria untuk penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Pegawai bagian keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Waropen. (2) Terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan. (3) Total 40 OPD dan dari setiap OPD diambil sebanyak 3 orang yaitu termaksud Kepala OPD, Kepala Sub Bidang Keuangan, dan Staf Keuangan. (4) Dan pegawai yang sudah bekerja di bagian keuangan pemerintah Kabupaten Waropen minimal 2-3 tahun.

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kasual. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang mencari pengaruh hubungan antar satu variabel dengan dengan variabel lain. Penelitian asosiatif ini berbentuk kasual, yang berarti hubungan yang bersifat sebab-akibat karena mempunyai variabel yang mempengaruhi (sebab) variabel lain dan ada variabel yang di pengaruhi (akibat) variabel lain.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian dengan mengukur koefisien *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Sujarweni, 2014). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,764	Realibility
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,903	Realibility
Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah	0,684	Realibility
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,926	Realibility

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Data diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0.6. Nilai *cronbach alpha* keseluruhan item lebih besar dari 0.6 berarti bahwa semua variabel realibel sehingga layak untuk dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

Statistik Deskriptif Penelitian

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KSDM	50	26	40	33.54	3.072
SPIP	50	17	43	35.82	5.656
SAKD	50	15	25	21.44	2.224
KLKPD	50	18	43	35.86	5.573

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa total data yang dianalisis berjumlah 50 data. dapat diketahui nilai rata-rata Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) yaitu sebesar 33.54, nilai KSDM terendah 0,26. sedangkan nilai KSDM tertinggi yaitu sebesar 0,40. Sedangkan standar deviasi yang diperoleh KSDM yaitu sebesar 3,072

Nilai rata-rata Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu sebesar 35,82, nilai SPIP terendah yaitu sebesar 0,17, sedangkan nilai SPIP tertinggi yaitu sebesar 0,43, maka diperoleh standar deviasi sebesar 5,656 sehingga hal tersebut menunjukkan nilai tersebut lebih besar dari seluruh sampel penelitian

Nilai rata-rata Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yaitu sebesar 21,44, nilai SAKD terendah sebesar 15, sedangkn nilai SAKD tertinggi yaitu sebesar 0,25. Berdasarkan hasil pengolahan data SAKD, maka diperoleh standar deviasi sebesar 2,224.

Nilai rata-rata Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) yaitu sebesar 35,86, nilai KLKPD terendah sebesar 0,18, sedangkan nilai KLKPD tertinggi yaitu sebesar 0,43. Berdasarkan hasil pengolahan data KLKPD, maka diperoleh standar deviasi sebesar 5,573.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.3
Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	12.023	6.414		1.875	.067
	KSDM	-.008	.249	-.005	-.033	.973
	SPIP	.749	.124	.760	6.055	.000
	SAKD	-.127	.365	-.051	-.348	.729

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan pada hasil analisis regresi berganda diatas, dapat diketahui bahwa nilai konstanta dari model regresi yang digunakan yaitu sebesar 12.023 yang menyatakan apabila tidak ada variabel independen maka nilai perusahaan bernilai 12.023 dengan koefisien regresi dari setiap variabel independen sebesar $b_1 = -0.008$, $b_2 = -0.749$, $b_3 = -0.127$. Dengan menggunakan hasil dari analisis regresi linear berganda tersebut, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi yang digunakan dapat dirumuskan berikut:

$$KLKPD = 12.023 - 0.008KSDM + 0.749SPIP - 0.127SAKD + e$$

Koefisien regresi untuk Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) sebesar 0.008 dan bertanda negatif, hal tersebut berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan KSDM dengan asumsi variabel lain tetap, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) mengalami penurunan sebesar 0.008. Koefisien regresi untuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 0.749 dan bertanda positif, hal ini berarti setiap peningkatan satu satuan SPIP dengan asumsi variabel lain tetap, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) mengalami kenaikan sebesar 0.749. Dan untuk koefisien regresi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebesar 0.127 dan bertanda negative, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan SAKD dengan asumsi variabel lain tetap,

maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) mengalami penurunan sebesar 0.127.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.4
Hasil Uji Koefisien Determinan
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.730 ^a	.533	.503	3.930

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Hasil analisis koefisien determinasi di atas, adalah sebesar 0.503. Hasil ini dapat diartikan bahwa besarnya variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 50,3%. Sedangkan sisanya 49,7% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian.

Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-T)

Tabel 4.5
Hasil Uji Statistik T
Coefficients^a

Variabel	Standardized Coefficients Beta	Nilai t	Sig	Keterangan
KSDM	-.005	-.033	.973	Tidak Signifikan
SPIP	.760	6.055	.000	Signifikan
SAKD	-.051	-.348	.729	Tidak Signifikan
t _{table}	1,678			

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.5, dapat disimpulkan mengenai hasil uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen sebagai berikut :

Berdasarkan pada hasil olah data yang telah dilakukan, dapat dilihat dan diketahui bahwa variabel KSDM tidak berpengaruh signifikan pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai signifikan sebesar 0,973. Hal tersebut dipertegas oleh nilai t_{hitung} sebesar -0.033, yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0.033 < 1.678$) sehingga hasil olah data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pada tabel 4.5 yang menunjukkan hasil olah data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan 0,05 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Hal tersebut dipertegas oleh t_{hitung} sebesar 6,055 yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,055 > 1,678$) sehingga hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pada tabel 4.5 yang menunjukkan hasil olah data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai signifikan sebesar 0,729. Hal tersebut dipertegas oleh nilai t_{hitung} sebesar -0.348, yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0.348 < 1.678$) sehingga hasil olah data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Tabel 4.6
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	811.442	3	270.481	17.510	.000 ^b
	Residual	710.578	46	15.447		
	Total	1522.020	49			

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Hasil pengujian statistik F di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan tingkat signifikan sebesar 0,05. Hasil pengujian tersebut juga menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($17.510 > 2.81$). Berdasarkan pada hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pembahasan

Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama (H_1) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, nilai signifikansi yang didapat untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) sebesar 0.973 lebih besar dari nilai α 0,05 artinya adalah KSDM tidak berpengaruh signifikan. Dan nilai t_{hitung} sebesar -0.033, yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0.033 < 1.678$), maka pengaruhnya negatif. sehingga hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa KSDM tidak berpengaruh signifikan negative terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga hipotesis pertama ditolak.

Hasil dari uji KSDM ini disebabkan oleh banyak dari responden yang terdiri dari kepala OPD, Kasubag keuangan, bendahara, dan staf keuangan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Waropen yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dalam ilmu akuntansi atau keuangan, ini dapat dilihat dari data responden, bahwa hanya 10% responden yang berlatar belakang pendidikan ilmu akuntansi atau keuangan, sedangkan sisanya 90% memiliki latar belakang pendidikan diluar ilmu akuntansi atau keuangan seperti

ilmu manajemen, ilmu pertanian, dan ilmu-ilmu lainnya. Selain itu, juga terdapat responden yang memiliki masa kerja kurang dari lima tahun, sehingga dianggap belum sepenuhnya berpengalaman dalam mengimplementasikan teori-teori akuntansi pada organisasi yang bersangkutan. Tentu hal ini dapat dikatakan sebagai penyebab KSDM berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Waropen.

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*) dimana kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini adalah berkaitan dengan pihak agen yang merupakan pihak pembuat laporan keuangan, harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan, seperti telah mengerti peran dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan, menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang semestinya, mendapatkan pelatihan dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan dan jika perlu sudah berpengalaman dalam bidang akuntansi sehingga dapat dengan mudah dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Widiatmo, 2020) (Philadelphina *et al.*, 2020), (Animah *et al.*, 2020) (Aprisyah & Yuliati, 2021), (Hainil *et al.*, 2021) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penyebabnya oleh faktor demografi (umur, latar belakang pendidikan, dan masa kerja) KSDM Kabupaten Waropen yang masih belum memadai, maka dari itu sangat dibutuhkan pengalaman serta peningkatan kompetensi pengetahuan dengan cara memperbanyak bimbingan teknis, seminar serta sosialisasi, bahkan melakukan studi banding.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua (H_2) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, nilai signifikansi yang didapat untuk variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05 artinya adalah SPIP berpengaruh signifikan. Berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar 6,055 yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,055 > 1,678$), maka pengaruhnya positif. Sehingga hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga hipotesis kedua dapat diterima.

Artinya SPIP yang diterapkan dapat mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan daerah, sehingga semakin tinggi sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan terhadap pegawai maka semakin bagus pula tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu OPD. SPIP berfungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai guna tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Sehingga penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

Teori keagenan yang dikaitkan dengan pemerintahan menyebutkan bahwa pemerintah

akan melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa serta mengorbankan kepentingan masyarakat. Untuk mengurangi *agency cost* akibat masalah keagenan tersebut maka diperlukan laporan keuangan dan pengungkapan informasi. Sistem pengendalian internal pemerintah dapat membantu pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Trisnawati & Wiratmaja, 2018), (Kurniawan, 2019), (Hartono & Ramdany, 2020) yang menyatakan bahwa SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini membawa implikasi bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dinas-dinas di Kabupaten Waropen dituntut untuk meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern di lingkungannya

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga (H_3) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Hasil olah data pada penelitian ini menunjukkan (SAKD) tidak berpengaruh signifikan pada tingkat signifikan 0,05 nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,729. Berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar -0.348, yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0.348 < 1.678$) sehingga hasil olah data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga hipotesis ketiga ditolak.

Hal ini dikarenakan seluruh OPD yang berada di Kabupaten Waropen belum sepenuhnya menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam membuat laporan keuangan yang salah satunya telah di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila laporan keuangan tersebut menerapkan Sistem akuntansi keuangan daerah, maka laporan keuangan yang diharapkan menghasilkan sebuah catatan dan laporan transaksi keuangan yang lebih terpercaya, sehingga pemakai laporan keuangan mengambil keputusan dengan baik. Hal ini juga diasumsikan bahwa staf keuangan pada seluruh OPD yang berada di Kabupaten Waropen belum sepenuhnya memiliki pengetahuan tentang bagaimana menggunakan sistem akuntansi yang sesuai. Maka dari itu OPD Kabupaten Waropen perlu melaksanakan pelatihan dan sosialisasi bagi para staf dalam membuat atau menyusun laporan keuangan dengan baik.

Menurut teori keagenan (*agency theory*) dalam hal sistem akuntansi keuangan daerah pihak agen sebagai pengelola keuangan harus mampu dan paham mengoperasikan sistem komputer, untuk mempermudah dalam pengelolaan data transaksi keuangan sehingga laporan yang dihasilkan dan disajikan dalam sistem pelaporan terstruktur dan akurat.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustika & Fadilah, 2020), (Wulandari & Drs. Dadang Rahmat, Ak., M.Ak., 2020) dan (Aprisyah & Yuliati, 2021) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah tidak terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis keempat (H_4) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, nilai signifikansi yang didapat untuk variabel KSDM, SPIP, SAKD sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai α 0,05 artinya adalah Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($17.510 > 2.81$), maka pengaruhnya positif. Sehingga hasil tersebut dapat diinterpretasikan Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga hipotesis keempat diterima.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai signifikan sebesar 0,973. Karena nilai signifikan $> 0,05$ (2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dapat dilihat dan diketahui berdasarkan tingkat signifikan 0,05 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Karena nilai signifikan $< 0,05$. (3) Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dapat dilihat dan diketahui berdasarkan tingkat signifikan 0,05 dan nilai signifikan sebesar 0,729. Karena nilai signifikan $> 0,05$. (4) Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen dengan menunjukkan hasil nilai signifikan sebesar 0,000.

Saran

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen disarankan agar memerhatikan kompetensi sumber daya manusia para pegawai pemerintahan dengan cara menempatkan pegawai dengan memerhatikan dan mempertimbangkan latar belakang pendidikan pegawai tersebut, serta disarankan agar memberikan pelatihan yang memadai kepada para pegawai pemerintahan guna membantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemerintah Kabupaten Waropen perlu memerhatikan dan meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta meningkatkan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah setiap pegawai supaya dalam mengerjakan tugas dan fungsi mereka semakin bertanggung jawab.

Bagi Penelitian Selanjutnya Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel independen lainnya guna mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah contohnya seperti pemanfaatan teknologi informasi akuntansi, pengawasan, sistem informasi, dan lain sebagainya. Bagi

Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk memperluas atau menambah sampel penelitian Karena, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijadikan sebagai sampel penelitian ini, hanya setengah (25 OPD) dari total OPD yang ada di Kabupaten Waropen (40 OPD).

Daftar Pustaka

- Anas, S. (2010). Pengantar Statistik Pendidikan. Rajawali Press.
- Animah, Suryantara, A. B., & Astuti, W. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 5(1).
- Aprisyah, P., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu). *Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 1855–1869.
- Azuar, J., Irfan, & Manurung, S. (2014). Metode Penelitian Bisnis. Umsu Press.
- Azwar, S. (1986). Validitas Dan Reliabilitas. Rineka Cipta.
- Dewi, I. G. A. K., & Dewi, P. E. D. M. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd) Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 11(1).
- Eni, Gunawan, & Hasmin. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumberdaya Manusia Dan Sarana Prasarana Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng. *Yume : Journal Of Management*, 1(2).
- Ferdian, T. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dusun Di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo). *Jurnal Akrab Juara*, 6(5).
- Gasperz, J. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku). *Jbmp*, 5(2). <https://doi.org/10.21070/jbmp.v5i2>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisa Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hainil, S., Bakkareng, & Silvera, D. L. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Polresta Padang. *Pareso Jurnal*, 3(3).
- Hartono, & Ramdany. (2020). Pengaruh Sap, Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Akuntansi*, 9(1), 14–23.
- Hasibuan, S. H. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sap Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Padang Lawas).
- Kurniawan, I. S. (2019). Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- Mustika, M., & Fadilah, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- Mutmainnah. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemda Kabupaten Baru).

- Nugroho, B. S. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Badan. *Akuntansi*, 1–18.
- Philadelphialia, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J-Iscan: Journal Of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17–35.
- Rizka, C. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd) Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Opd Kota Medan).
- Saraswati, I. G. A. G., & Budiasih, I. G. A. N. (2019). Pengaruh Good Governance, Kompetensi Sdm Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(3).
- Siahaya, E., Asnawi, M., & Layuk, P. K. A. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 3(1), 1–16.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta. <https://doi.org/89n3pdyzzakoh7w6n8zrjgddktjh8iwfg6ekrvi3kvpq>
- Sujarweni, V. W. (2014). *Spss Untuk Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Suntono, & Kartika, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Demak). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 29–38.
- Trisnawati, N. N., & Wiratmaja, D. N. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1).
- Walizer, Michael, H., & Wienir, P. L. (1987). *Metode Dan Analisis Penelitian : Mencari Hubungan (Jilid 2)*. Erlanga.
- Widiatmo, H. A. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Wulandari, T A. M., & Drs. Dadang Rahmat, Ak., M.Ak., C. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Internal, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus : Skpd Kota Dki Jakarta).
- Zulganef. (2006). *Pemodelan Persamaan Struktur Dan Aplikasinya Menggunakan Amos 5*. Pustaka